

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM MENANGGULANGI NARASI ISLAMISME DI INDONESIA

**Hasan Baharun & Robiatul Awwaliyah
(Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo)**

Abstrak:

Kertas kerja ini memaparkan pendidikan multikultural dalam usahanya menanggulangi narasi Islamisme di Indonesia. Intisari dari pendidikan multikultural adalah sebuah ide dan gerakan pembaruan dalam proses pendidikan. Kemajemukan Indonesia adalah dua mata pisau yang memiliki sisi positif dan negatif. Dalam kemajemukan itu sendiri, keeratan afiliasi kelompok muncul bersamaan dengan potensi perpecahan dalam konteks situasi yang tak terkendali dengan baik. Oleh karenanya, pendidikan multikultural menawarkan demokrasi, kesetaraan, kemerdekaan, dan keberagaman dalam sebuah pendekatan. Dengan kedatangan pendidikan multikultural, ini diharapkan bahwa setiap lapisan masyarakat merasa dikenali, dihargai, diperlakukan secara demokratis dan pantas kendati berbagai perbedaan budaya. Sebagai hasilnya, mereka mendapatkan kesempatan yang sama dalam mencapai tujuan-tujuannya. Indikasi idealnya adalah adanya kemauan untuk menerima dan menghargai kelompok-kelompok lain dari etnik, gender, dan afiliasi keberagaman dan budayanya. Dengan kata lain, pendidikan multicultural muncul sebagai pengikat, kepenghubungan, pengaman, dan penjamin terhadap keberlangsungan kemajemukan. Ajuan pendidikan multikultural ini muncul untuk menanggulangi narasi Islamisme di Indonesia yang muncul sebagai akibat dari ketika Islam berhadapan dengan modernitas yang identik dengan Barat.

Kata Kunci: *Pendidikan Multikultural; Narasi; Islamisme.*

Abstract:

This paper presents multicultural education in tackling Islamism narration in Indonesia. The heart of multicultural education is the idea and renewal movement in educational process. Indonesian diversity is like a double-edged knife, which involves both positives and negatives. In the diversity itself, strong group affiliation emerged as well as potential of disunity appears in the context of unwell-managed circumstances. Hence, multicultural education offers democracy, equality, freedom, and pluralism in a single approach. With the advent of multicultural education, it is hoped that all levels of society will feel recognized, appreciated, democratically and equitably treated despite cultural differences. As a result, they have equal opportunity to achieve their goals. The ideal indication shows the willingness to accept and appreciate other groups of different ethnics, gender, and religious affiliation and cultures. In other words, multicultural education exists as a binder, liaison, safety, and assurance of sustainability diversity. This multicultural education proposal emerged in order to overcome the narration of Islamism, which born as encounter efforts between Islam vis-à-vis the modernity associated with the west.

Keywords: *Multicultural Education; Narration; Islamism.*

A. Pendahuluan

Masyarakat adalah suatu kesatuan yang didasarkan pada ikatan-ikatan yang telah teratur dan boleh dikatakan stabil. Dalam masyarakat terdapat sekumpulan individu yang terdiri dari latar belakang, jenis kelamin, agama, suku, bahasa, budaya, tradisi, status sosial, kemampuan ekonomi, pendidikan, keahlian, pekerjaan, minat, hobi, dan sebagainya yang berbeda-beda. Perbedaan ini merupakan sebuah kekayaan dan juga sesuatu yang dapat dijadikan bahan-bahan untuk mencapai berbagai kebutuhan. Akan tetapi, tidak semua orang menyadari hal tersebut, sehingga cenderung bersikap individualistik, kurang peduli terhadap masyarakat, tidak melihat bahwasannya keberlangsungan dan ketertiban masyarakat sangat berpengaruh kepada ketentraman hidupnya.¹

Masyarakat merupakan tempat di mana individu dan kelompok berinteraksi, menjalin hubungan sesamanya, di mana usaha terpadu, saling memahami dan menyatakan rasa masing-masing. Terdapat masyarakat yang telah tergolong maju, tergolong sedang, dan tertinggal. Selain itu, terdapat pula masyarakat yang berada dalam keadaan aman, damai, dan bersatu padu, dan

¹ Abuddin Nata, *Sosiologi Pendidikan Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), 55.

adapula masyarakat yang berada dalam keadaan konflik, perang dan terpecah belah.²

Dewasa ini tengah marak narasi-narasi islamisme dalam media massa yang merupakan sebuah bukti masyarakat yang sedang berada dalam keadaan konflik. Narasi merupakan sebuah tahap awal proses ideologisasi kelompok islamis. Mengetahui narasi yang berkembang di kalangan kelompok islamis akan terpetakan isu-isu apa saja yang menjadi narasi utama dalam gerakan kelompok islamis serta bagaimana narasi tersebut beroperasi.³

Demonstrasi kolosal yang lebih dikenal dengan “Aksi Damai 411” dan “Aksi Damai 212”. Aksi ini diikuti oleh jutaan orang yang datang dari berbagai daerah dengan modal transportasi, juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. Genderang yang ditabuh oleh Habieb Rieziq sebagai Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) diikuti dan diamini oleh hampir semua organisasi Islam baik secara individu maupun organisasi. Di luar tuntutan politis untuk segera menghukum Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang diduga menistakan agama, aksi damai ini dapat dilihat dari beberapa perspektif di antaranya adalah dari budaya populer. Secara umum dapat ditengarai bahawa Aksi Bela Islam I hingga III lebih banyak diwarnai oleh kelompok muslim perkotaan.

Di tengah memudarnya batasan-batasan Islam tradisional, gugus muslim moderat perkotaan mulai terbentuk seiring dengan munculnya banyak program keagamaan di televisi. Isu politik saja tidak cukup untuk menarik jutaan orang ke Jakarta, namun karena dibarengi isu etnis dan agama. Oleh karena itulah, aksi damai yang berawal dari isu pemilihan gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dapat menjadi isu nasional yang dimungkinkan terus berkembang dan bahkan melebar ke isu yang lain.⁴

Kegelisahan masyarakat tersebut di atas mengharuskan dunia pendidikan mampu menenangkan jiwa masyarakat. Peranan pendidikan didalam perubahan kehidupan suatu komunitas memang sangat menentukan. Pendidikan rakyat telah menunjang perubahan masyarakat tradisional menjadi masyarakat industri di Eropa. Pendidikan memberikan kemampuan kepada suatu komunitas untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang terbuka dimasa depan. Masyarakat masa depan adalah masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan. Artinya, apabila kekuatan ilmu pengetahuan tidak digunakan sebagaimana mestinya maka suatu komunitas akan terjepit di antara kekuatan-kekuatan yang ada sehingga

² Nata, *Sosiologi Pendidikan Islam*, 56.

³ Ahmad Syafii Maarif, “Setelah “Bela Islam”, Gerakan Sosial Islam, Demokratisasi, dan Keadilan Sosial,” *Jurnal Maarif*, Vol. 11 No. 2 (Desember 2016), 188.

⁴ Maarif, “Setelah “Bela Islam”, Gerakan Sosial Islam, Demokratisasi dan Keadilan Sosial”, 189.

mengakibatkan kehancuran komunikasi. Itu sebabnya mengapa pendidikan merupakan modal utama dalam menghadapi masa depan.⁵

Dalam konteks inilah akan dijumpai betapa pendidikan yang dari segi kuantitas menunjukkan perkembangan yang dinamis mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi dalam menghadapi berbagai persoalan. Tidak saja pada tataran normatif-filosofisnya, tetapi juga menyangkut orientasi kultural masa depan.⁶ Aksi-aksi seperti yang telah tersebut di atas dalam merekrut anggota, biasanya mereka menyasar orang-orang terutama dari kalangan pemuda atau remaja yang pengetahuan agamanya sangat minim. Pemuda dan remaja-remaja itu didoktrin dengan semangat jihad serta iming-iming materi dan pahala besar bahkan dengan pahala *shahīd*.⁷

Berdasarkan uraian masalah yang tengah dialami masyarakat terkait narasi islamisme, para ahli mengupayakan wawasan pendidikan multikultural dengan berbagai konsep yakni; demokrasi, persamaan dan kebebasan secara kompherensif dan mendasar melalui pendidikan yang berlangsung di sekolah-sekolah secara efektif, mendasar dan berjangka panjang.

Bikhu Parekh, mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai: “an education in freedom, both in the sense of freedom from ethnocentric prejudices and biases, and freedom to explore and learn from other cultures and perspectives”.⁸ Dari definisi ini, hal yang harus digarisbawahi dari diskursus multikulturalisme dalam pendidikan adalah identitas, keterbukaan, diversitas budaya dan transformasi sosial. Identitas sebagai salah satu element dalam pendidikan mengandaikan bahwa peserta didik dan guru merupakan satu individu atau kelompok yang merepresentasikan satu kultur tertentu dalam masyarakat. Identitas pada dasarnya inheren dengan sikap pribadi ataupun kelompok masyarakat, karena dengan identitas tersebutlah, mereka berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain, termasuk pula dalam interaksi antar budaya yang berbeda. Dengan demikian dalam pendidikan multikultural, identitas-identitas tersebut diasah melalui interaksi, baik internal budaya (*self critic*) maupun eksternal budaya.

Sebagai sebuah konsepsi, pendidikan multikultural menjadi gagasan yang cukup kontekstual dengan realitas masyarakat kontemporer saat ini. Prinsip

⁵ H.A.R.Tilaar, *Multikulturalisme dan Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional* (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), 37.

⁶ Nata, *Sosiologi Pendidikan Islam*, 190.

⁷ Moh. Zuhri Zaini, “Memahami dan Menangkal Kelompok Radikal Transnasional,” *Majalah Al-Fikr*, (Mei-Oktober 2017), 10.

⁸ Bikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory* (Cambridge: Harvard University Press, 2000), 230.

mendasar tentang kesetaraan, keadilan, keterbukaan, pengakuan terhadap perbedaan adalah prinsip nilai yang dibutuhkan manusia di tengah himpitan budaya global dan eksistensi islamisme radikal. Oleh karena itu, sebagai sebuah gerakan budaya, pendidikan multikultural adalah bagian integral dalam pelbagai sistem budaya dalam masyarakat saat ini.

B. Pendidikan Multikultural untuk Masyarakat Plural

Pendidikan merupakan wahana penting dan media yang efektif untuk mengajarkan norma, mensosialisasikan nilai, dan menanamkan etos kerja dikalangan warga masyarakat. Pendidikan juga dapat menjadi instrument untuk memupuk kepribadian bangsa, memperkuat identitas nasional, dan memantapkan jati diri bangsa. Pendidikan dapat menjadi wahana strategis untuk membangun kesadaran kolektif sebagai warga dengan mengukuhkan ikatan-ikatan sosial, tetap menghargai keragaman budaya, ras, suku-bangsa, agama, sehingga dapat memantapkan keutuhan nasional.⁹ Adapun tujuan dari pendidikan ialah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mandiri, tangguh, cerdas, kreatif, disiplin, beretos kerja, professional, bertanggung jawab, produktif, dan sehat jasmani-rohani.¹⁰

Sementara, istilah “multicultural” dapat dipahami sebagai realitas bahwa sebuah Negara atau masyarakat adalah beragam dan majemuk. Atau dapat pula diartikan sebagai “kepercayaan” kepada normalitas dan penerimaan keragaman.¹¹ Pengertian tentang multikultural setidaknya mengandung dua pengertian yang sangat kompleks yaitu “multi” yang berarti plural, “kultural” berisi pengertian kultur atau budaya. Istilah plural mengandung arti yang berjenis-jenis, karena pluralisme bukan berarti sekedar pengakuan akan adanya hal-hal yang berjenis, namun pengakuan yang memiliki implikasi-implikasi politis, sosial dan ekonomi. Oleh sebab itu, pluralisme bersangkutan dengan prinsip-prinsip demokrasi.¹² Selain pengertian di atas, multikultural juga berkaitan dengan epistemologi, namun pengertian perkembangan ilmu pengetahuan di dalam kaitannya dengan kehidupan sosial.¹³ Dalam realitas

⁹ Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), 5.

¹⁰ Lihat M. Pidarta, *Landasan Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).

¹¹ Lihat Zakiyuddin Baidhawiy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural* (Jakarta : Gelora Aksara Pratama, 2005), vii.

¹² Tilaar, *Multikulturalisme dan Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, 82.

¹³ Tilaar, *Multikulturalisme dan Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, 83.

sosial strategi multikulturalis juga memerlukan citra positif namun tidak memberikan persyaratan bagi asimilasi. Namun, suku bangsa diyakini memiliki status setara, memiliki hak untuk menjaga warisan budaya mereka.¹⁴

Dari deskripsi di atas, maka pendidikan multikultural merupakan sebuah gagasan yang perlu diurusutamakan. Pendidikan multikultural sendiri dapat didefinisikan sebagai pendidikan tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu bahkan dunia secara keseluruhan. Pendidikan multikultural adalah suatu pendekatan progresif untuk melakukan transformasi pendidikan yang secara menyeluruh membongkar kekurangan, kegagalan, dan praktik-praktik diskriminasi dalam proses pendidikan. Pendidikan multikultural merupakan respon terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok. Pendidikan multikultural merupakan pengembangan kurikulum dalam aktivitas pendidikan untuk memasuki berbagai pandangan, sejarah, prestasi, dan perhatian terhadap orang-orang dari etnis lain.¹⁵

Hal ini berarti pendidikan multikultural secara luas mencakup seluruh siswa tanpa membedakan kelompok-kelompok, baik itu etnis, ras, budaya, strata sosial, agama, dan gender sehingga mampu mengantarkan siswa menjadi manusia yang toleran dan menghargai perbedaan. Musa Asy'arie dalam jurnal pemikiran alternatif pendidikan mengemukakan bahwa pendidikan multikultural merupakan proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Dengan pendidikan multikultural, menurutnya diharapkan adanya kekenyalan dan kelenturan mental bangsa menghadapi benturan konflik sosial.¹⁶

Pendidikan multikultural merupakan suatu paham dan dilain pihak merupakan suatu pendekatan, yang menawarkan paradigma kebudayaan untuk mengerti perbedaan-perbedaan yang selama ini ada di tengah-tengah masyarakat kita dan di dunia. Secara etimologi istilah pendidikan multikultural terdiri dari dua term, yaitu pendidikan dan multikultural. Pendidikan berarti proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha

¹⁴ Chris Barker, *Cultural Studies*, Terj. Nurhadi (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2000), 379.

¹⁵ Iis Arifudin, "Pemikiran Alternatif Pendidikan," *Jurnal Insania*, Vol. 12 No.2 (Mei-Agustus 2007), 220.

¹⁶ Arifudin, "Pemikiran Alternatif Pendidikan", 233.

mendewasakan melalui pengajaran, pelatihan, proses dan cara mendidik. Dan multikultural diartikan sebagai keragaman kebudayaan, aneka kesopanan.¹⁷

Pendidikan multikultural berarti proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku dan aliran (agama). Pengertian seperti ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam pendidikan, karena pendidikan dipahami sebagai proses tanpa akhir atau proses sepanjang hayat. Dengan demikian, pendidikan multikultural menghendaki penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap harkat dan martabat manusia.¹⁸

Tujuan umum pendidikan multikultural, yaitu : 1). Mengembangkan pemahaman yang mendasar tentang proses menciptakan sistem dan menyediakan pelayan pendidikan yang setara. 2). Menghubungkan kurikulum dengan karakter guru, pedagogi, iklim kelas, budaya sekolah dan konteks lingkungan sekolah guna membangun suatu visi “lingkungan sekolah yang setara”.¹⁹

Dalam konteks ini multikultural memiliki tiga konsep penunjang yakni, demokrasi, persamaan, kebebasan dan pluralisme. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan). Dalam perkembangannya, Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi dalam rumusannya yang sangat terkenal yaitu “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Secara filosofis, definisi ini tidak cukup operasional untuk membuktikan bahwa rakyat memang memegang kendali penuh atas kekuasaan politik, ia lebih dimaksudkan untuk mengungkap pemikiran ideal dari ungkapan tentang suatu realitas yang hidup, pengalaman praktis atau kemungkinan mempraktekannya.²⁰

Demokrasi dalam hal ini menjadi topic perdebatan, Muhammad Al-Ghazali dan John Esposito, Abuddin Nata berpendapat bahwa *shura* (musyawarah) adalah suatu bentuk demokrasi islam yang dapat dijadikan titik tolak demokrasi dalam islam. Pernyataan tersebut ditentang oleh Ustadz Abu Bakar Ba’asyir, pendiri Majelis Mujahidin Indonesia bahwa demokrasi bersama-sama dengan nasionalisme dan sekularisme berasal dari “rahim” Barat yang bersifat sekularis, liberalistik, dan antroposentris. Di Barat, demokrasi lahir sebagai bentuk protes keras dan tuntutan kebebasan mengemukakan pendapat dan beraktualisasi dalam segala bidang kehidupan, yang kala itu dibelenggu,

¹⁷ Ach. Syaikh, “Pemikiran tentang Pengembangan Pendidikan Islam Multikultural,” *Jurnal Falasifa*, Vol. 7 No. 1 (Maret 2016), 129.

¹⁸ Andre Ata Ujan, *Multikulturalisme* (Jakarta : Indeks, 2011), 15.

¹⁹ Akhmad Hidayatullah al Arifi, “The Implementation of Multicultural Education in The Educational Practices,” *Jurnal Pembangunan Pendidikan*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2012), 79.

²⁰ M. Abid al-Jabiri, *Syuro Tradisi Partikularitas Universalitas* (Yogyakarta: LKIS, 2013), 6.

dikekang, dirampas dan dikuasai otoritas kaum agama dan kaum feodalistik yaitu dikuasai para bangsawan.²¹

Akan tetapi, dalam rangka pelaksanaan multikulturalisme, demokrasi yang diinginkan oleh Islam adalah demokrasi yang memadukan antara kepentingan individu dan sosial, antara nilai-nilai yang berasal dari Tuhan dan nilai-nilai yang berasal dari manusia dalam hal ini islam menyebutnya dengan *shura* bukan demokrasi liberal yang berbasis kekerasan seperti dunia Barat. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Syura ayat 38 sebagai berikut :

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

“Dan urusan mereka diputuskan melalui musyawarah di antara mereka (QS.As-Syura : 38).

Dalam hal ini, mereka memiliki konsep tersendiri mengenai demokrasi. Yang mana konsep tersebut tidak sama dengan demokrasi liberal yang berlaku di Barat. Sebagaimana demokrasi, persamaan juga menimbulkan berbagai perdebatan karena pilar persamaan ini juga lahir dari “rahim” Barat. Kaum Barat hanya mengakui persamaan hukum di mana mereka dianggap sama dan harus setara dimuka hukum. Kaum Barat menolak jika persamaan tersebut menuntut pembayaran pendapatan yang sama untuk semua individu yang memberikan kontribusi berbeda-beda dalam proses ekonomi. Konsep persamaan egalitarian berbeda dengan konsep kaum Barat tersebut, kaum egalitarian berpendapat bahwa semua orang harus diperlakukan sama dalam segala hal, karena mereka memang sama.²²

Konsep persamaan yang dikehendaki sebagai multikultural adalah mencoba menggabungkan konsep liberal dengan egalitarian tersebut. Sehingga timbul konsep yang menuntut penghapusan hukum dan hak-hak istimewa yang tidak dibenarkan, yang hanya menyediakan posisi-posisi sosial, ekonomi, dan politik bagi kelas, rasa atau seks tertentu. Para tokoh intelektual muslim di Indonesia pada umumnya menerima konsep ini. Mereka mendasarkan konsep mereka pada Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di

²¹ Nata, *Sosiologi Pendidikan Islam*, 241.

²² Nata, *Sosiologi Pendidikan Islam*, 244.

antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurat : 13)”.

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dijelaskan bahwasannya Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan, walaupun terdiri dari bangsa, ras, agama, dan kulit yang berbeda-beda pada hakikatnya mereka bersaudara serta memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan.²³ Dalam hal ini persamaan kesempatan dalam pendidikan merupakan prioritas utama karena pendidikan dapat menciptakan mobilitas sosial yang mana semakin tinggi pendidikan hampir dipastikan dapat meningkatkan prestise, kemampuan dan kekayaan yang tinggi.²⁴

Dari beberapa penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwasannya Islam adalah agama yang mendukung adanya persamaan umat manusia dalam hal mendapatkan perlakuan hukum, memperoleh kesempatan untuk mengenyam pendidikan, kesehatan, pekerjaan, memiliki harta benda, dan menduduki berbagai jabatan. Perbedaan agama, etnis, suku, budaya, warna kulit, dan lain sebagainya tidak dapat dijadikan alasan untuk memperlakukan mereka dengan perlakuan yang berbeda.

Kebebasan didefinisikan sebagai tidak adanya paksaan atau rintangan. Pilar kebebasan ini juga lahir dari Rahim Barat yang menginginkan dapat melakukan apa saja, tanpa dibatasi moral, agama, dan lain sebagainya. Kebebasan bagi mereka kaum Barat adalah membiarkan segala yang diinginkan manusia sehingga dapat mencapai tujuan hidupnya, berupa kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Akan tetapi, pilar yang diinginkan oleh islam bukanlah seperti itu, yakni sebuah kebebasan yang bertanggung jawab, kebebasan yang dikendalikan oleh kebebasan orang lain, kebebasan yang dibatasi hukum, adat istiadat, moral dan kesepakatan bersama. Adanya batasan dalam pilar kebebasan dikarenakan yang memiliki kebebasan mutlak hanya Allah. Sebagai manusia kebebasan yang dimiliki ialah kebebasan yang memiliki batasan seperti, kebebasan dalam berbicara harus dibatasi dengan ketidakbolehan mengganggu kepentingan umum.²⁵

Pluralisme secara harfiah berarti keragaman, dan perbedaan yang atas segala sesuatu yang terjadi di muka bumi seperti keragaman agama, etnis, suku, bahasa, budaya, warna, kulit, bahasa, tempat tinggal, dan sebagainya. Akan tetapi

²³ Baca Abdillah Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna; Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999).

²⁴ Nata, *Sosiologi Pendidikan Islam*, 245.

²⁵ Nata, *Sosiologi Pendidikan Islam*, 249.

kaum Barat mengistilahkan pluralisme sebagai sebuah aliran filsafat yang menentang konsep Negara absolut dan berdaulat. Al-Qur'an dalam Surat al-Rūm ayat 22 menyatakan bahwasannya perbedaan bahasa, warna kulit manusia harus diterima sebagai hal yang positif yang merupakan salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah. Selain itu Al-Qur'an juga menegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 48 :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ
فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا
مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا
آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Ayat tersebut menyatakan bahwasannya perbedaan pandangan atau aturan manusia tidak harus ditakuti akan tetapi harus dijadikan titik tolak untuk berkompetisi menuju kebaikan.²⁶ Seperti pilar-pilar yang lain di atas, bukan pluralisme ala kaum Barat seperti itu yang diinginkan Islam yakni pluralisme yang bukan hanya sekedar pengakuan bahwa pluralisme merupakan *sunnatullah*. Lebih dari itu, pluralisme diharapkan mendatangkan keberkahan dan nilai tambah bagi manusia yang mana hal tersebut didasarkan pada perilaku yang saling menghargai, menghormati, memanfaatkannya secara produktif untuk kepentingan bersama, saling meminta dan memberi, saling menunjang dan menopang, saling berbagi pengalaman kehidupan masing-masing, rasa tidak saling mengganggu dan mencampuri urusan masing-masing, dan selalu mencari titik temu untuk kebaikan bersama.

C. Narasi Islamisme; Dari Wacana hingga Gerakan

Narasi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam sebuah tulisan yang rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu dijabarkan dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Narasi merupakan satu bentuk karangan atau tulisan yang bersifat menjejarahkan sesuatu berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu. Narasi mementingkan urutan kronologis suatu peristiwa, kejadian, dan masalah. Karangan narasi mendahulukan tahapan-tahapan yang berhubungan dengan waktu.²⁷

²⁶ Nata, *Sosiologi Pendidikan Islam*, 253.

²⁷ Mahmudi, Ida Zulaeha dan Teguh Supriyanto, "Menulis Narasi dengan Metode Karyawisata dan Pengamatan Objek Langsung Serta Gaya Belajarnya," *Jurnal Journal of Primary Education*, Vol. 2 (Januari 2013), 182.

Narasi merupakan bentuk wacana yang berusaha menggambarkan dengan sejelas-jelasnya kepada pembaca suatu peristiwa yang telah terjadi, adapun ciri-ciri karangan narasi yaitu: (1) menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan, (2) dirangkai dalam urutan waktu, (3) berusaha menjawab pertanyaan, apa yang terjadi, dan (4) ada konflik. Berdasarkan tujuan atau sasarannya, narasi dibedakan menjadi dua jenis yaitu narasi ekspositoris dan narasi sugestif. Narasi ekspositoris adalah narasi yang hanya bertujuan untuk memberi informasi kepada para pembaca, Narasi sugestif adalah narasi yang disusun dan disajikan sekian macam, sehingga mampu menimbulkan daya khayal para pembaca.²⁸

Pada zaman dahulu penduduk tidak begitu padat, kepemilikan lahan relative masih luas. Penduduk mulai mengalami ledakan baru setelah tahun 1970-an. Biasanya setelah bersih-bersih rumah, menyapu, memasak, menunggu suami pulang dari sawah, lading ataupun bekerja sebagai buruh, para istri biasa bermain kerumah tetangga alias *nonggo*. Karena tak ada pekerjaan lagi, biasa hidup santai, biasanya menghabiskan waktu untuk ngobrol, menggossip, bergunjing, sambil mencari kutu. Itu cerita masa lalu. Begitu memsuki daerah digital, setelah Mark Zuckenberg, mahasiswa *drop out* Universitas Harvard, Amerika Serikat menemukan media sosial bernama *facebook* tahun 2004, cerita mulai berubah. Seperti virus, *facebook* mulai diakrabi di Indonesia sejak 2008 sampai sekarang. Negeri ini menjadi negeri peringkat kelima pemakai medsos. Tak kurang dari 60 juta penduduknya punya gadget. Survey dari Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) Tahun 2016, pengguna internet mencapai 132,7 juta jiwa.²⁹

Selanjutnya, di media sosial dan massa tidak jarang kerap kali digunakan untuk tujuan politik dan sebagainya melalui narasi-narasi yang tersebar didalamnya. Seperti narasi yang tengah marak beredar di sosial media dan massa terkait Aksi Damai 411 dan 212 yang memang merupakan sebuah fenomena yang spektakuler. Media *online* merupakan salah satu ruang yang digunakan untuk melakukan radikalisisasi.³⁰ Narasi merupakan cerita yang disampaikan oleh surat kabar, novel, komik, film, dan sebagainya. Media sebagai penyampai adalah *narrator* yang memberikan perspektif terhadap beritanya.

Perjumpaan antara Islam dan modernitas yang berasosiasi dengan Barat menghasilkan paling tidak tiga tanggapan yaitu reformisme, sekularisme dan Islamisme. Kalangan reformis berpandangan bahwa umat Islam dapat

²⁸ Mahmudi, "Menulis Narasi dengan Metode Karyawisata dan Pengamatan Objek Langsung Serta Gaya Belajarnya, 182-183.

²⁹ Hari Puspita, "Tradisi Petan dan Medsos," *Majalah Al-Fikr*, (Mei-Oktober 2017), 40-41.

³⁰ Zainal Fikri, "Narasi Dediradikalisisasi di Media *Online* Republika dan Ar Rahmah", *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 11 No. 2 (2013), 265.

mengambil beberapa hal positif dari pencapaian pemikiran Barat untuk diadaptasi demi kemajuan Islam. Kalangan sekular menilai bahwa apa yang dicapai oleh Barat melalui sekularismenya (memisahkan antara agama dan politik) adalah jalan terbaik yang juga dapat ditempuh oleh umat Islam. Kalangan Islamis berpendapat bahwa Islam mempunyai sistem yang telah lengkap dan final sehingga apa yang datang dari Barat adalah thagut yang mesti ditolak. Islamisme adalah istilah yang sering diasosiasikan dengan sistem pemikiran atau ideologi yang memahami Islam tidak hanya sebagai agama tetapi juga hendak menjadikannya dasar negara (*al-Dīn wa al-Daulah*).

Meskipun beberapa pengamat menunjuk adanya doktrin tekstual dalam Islam yang cenderung mendorong penganutnya untuk terlibat dengan Islamisme, sulit untuk menyangkal kenyataan bahwa ide itu sendiri dikemukakan dalam lanskap politik sekuler. Nanti akan diperlihatkan bahwa persoalan Islamisme adalah persoalan modern. Dengan kata lain, ide dasar Islamisme bukan usaha untuk menghidupkan kembali mimpi Abad Pertengahan di Abad Modern, melainkan bagian dari paradoks yang dihasilkan oleh janji kemoderenan itu sendiri.³¹

Istilah “Islamisme” pertama kali dikemukakan oleh seorang filsuf Prancis terkemuka, Voltaire, sebagai pengganti kata “mahometisme” yang ketika itu dipakai sebagai acuan untuk “agama orang Arab” di kalangan orang Eropa. Kata ini lalu diadopsi ke dalam bahasa Inggris pada edisi 1900 Oxford English Dictionary. Akan tetapi, setelah itu istilah ini sekian lama jarang digunakan. Akhir-akhir ini, ketika Islam politik menjadi topik utama dalam politik internasional pasca-perang dingin, Islamisme sekali lagi menjadi istilah yang dipakai secara luas oleh para sarjana dan wartawan. Sekarang secara umum istilah itu mengacu pada jenis tertentu dari interpretasi agama, organisasi dan gerakan di kalangan umat Islam yang menekankan keunikan dan keunggulan Islam *vis-à-vis* ideologi politik lainnya. Istilah Islamisme sering juga dipertukarkan dengan istilah fundamentalisme dan salafisme.³²

Fenomena radikalisme yang dilakukan oleh sebagian kalangan umat Islam, oleh pers Barat dibesar-besarkan, sehingga menjadi wacana internasional dan terciptalah opini publik bahwa Islam itu mengerikan dan penuh dengan kekerasan. Akibatnya, tidak jarang hal-hal negatif banyak dialamatkan kepada Islam sehingga umat Islam terpojokkan sebagai umat yang dicurigai. Hal yang demikian terjadi karena masyarakat Barat mampu menguasai pers yang

³¹ Amin Mudzakkir, “Islam dan Politik di Era Kontemporer,” *Jurnal Epistemé*, Vol. 11, No. 1, (Juni 2016), 37-38.

³² Mudzakkir, “Islam dan Politik di Era Kontemporer”, 38.

dijadikan instrumen yang kuat untuk memroyeksikan kultur dominan dari peradaban global. Sehingga yang ditangkap masyarakat dunia adalah apa yang didefinisikan dalam media-media Barat.³³

Label Islam digunakan untuk menyebut gerakan fundamentalis sangat menyenangkan bagi pers Barat ketimbang label Tamil di Srilangka, militan Hindu di India, IRA (kelompok bersenjata Irlandia Utara), militan Yahudi sayap kanan, sekte kebatinan di Jepang atau bahkan musuh lamanya, komunis-marxis yang tidak jarang menggunakan jalan kekerasan sebagai solusi penyelesaian masalah.³⁴ Contoh yang sangat jelas adalah aksi tutup mulut para elit politik Barat atau aksi bicara dalam kepura-puraan ketika melihat praktik kekerasan yang dilakukan oleh ekstrimis Yahudi atau pun serdadu Israel atas orang-orang Arab Palestina. Apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pelaku kekerasan ini secara faktual sama dengan apa yang dilakukan oleh kelompok pelaku garis keras “radikalisme Islam.” Tetapi sebutan radikalisme lebih kental ditujukan kepada gerakan Islam.

D. Eksistensi Islamisme Radikal di Indonesia

Islamisme didefinisikan dan dimaknai secara beragam. Tidak adanya consensus di antara para ilmuwan mengenai terminologi dari islamisme membuat adanya beragam konseptualisasi mengenai islamisme. Bahkan karakteristik utama yang sering dinisbatkan kepada islamisme seperti “*Islamic fundamentalism, political Islam, Islamic radicalism or radical Islamism*” belum dapat memberikan kejelasan akan terminologi Islamisme. Mozaffari dalam JIPSi mendefinisikan islamisme sebagai “*a religious ideology with a holistic interpretation of islam whose final aim is the conquest of the world by all means*” dengan definisi ini ada empat elemen yang saling terkait yaitu, ideologi, kegamaan, penafsiran holistik tentang Islam, penaklukan dunia, dan penggunaan segala cara untuk mencapai tujuannya.³⁵

Gerakan Islamisme adalah sebutan yang disematkan kepada individu atau kelompok yang hendak mentransformasikan masyarakat berdasarkan idealitas yang diimajinasikan, yakni ingin membangun kekhalifahan islam. Masdar Hilmy dalam Muhammad Rizky, menyebut Islamisme sebagai nama lain

³³ Sun Choirol Ummah, “Akar Radikalisme Islam di Indonesia,” *Jurnal Humanika*, No.12 (September 2012), 115.

³⁴ Ummah, “Akar Radikalisme Islam di Indonesia”, 115-116.

³⁵ Faisal Nuridin Idris, “Memetakan Narasi Islamisme di Medan, Sumatera Utara ; Investigasi terhadap Pola Penyebaran dan Penerimaan Terhadap Radikalisme,” *Jurnal Politik dan Komunikasi (JIPi)*, Vol. 5 No. 2 (Desember 2015), 28.

dari fundamentalisme, radikalisme, dan ekstrimisme. Tujuan utama dari gerakan ini ialah untuk kepentingan ekonomi dan politik.³⁶

Narasi Islamisme merupakan satu bentuk karangan atau tulisan yang bersifat menjejarahkan sesuatu berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu yang mana tujuannya untuk kepentingan ekonomi dan politik. Narasi Islamisme merupakan cerita yang disampaikan oleh surat kabar, novel, komik, film, dan sebagainya yang berisikan empat elemen yang saling terkait yaitu, ideology, kegamaan, penafsiran holistik tentang Islam, penaklukan dunia, dan penggunaan segala cara untuk mencapai tujuannya yang mana tujuannya ialah untuk kepentingan ekonomi dan politik.

Seperti sebuah paduan suara, semua pemberitaan media Barat khususnya di Amerika Serikat tentang kekalahan Ahok dalam Pilkada Jakarta 2017 di-*frame* dalam sebuah alunan nada yang sama. Bunyi redaksinya dapat dikemas berbeda-beda, namun narasinya tunggal. Sebagai contoh, *The Wall Street Journal* (19/4) mengangkat judul: *Islamist-Backed Candidate Ousts Jakarta's Christian Governor* (Kandidat yang didukung kelompok Islamis menjungkalkan Gubernur Kristen Jakarta) "JAKARTA, Indonesia—*Voters in the capital ousted a minority Christian confidant of the president in gubernatorial elections, replacing him with a candidate riding a wave of hard-line Islamist support that has upended politics in the world's largest Muslim-majority nation*". *The New York Times* (19/4): *Jakarta Governor Concedes Defeat in Religiously Tinged Election* (Gubernur Jakarta mengakui kekalahan dalam Pemilu yang diwarnai isu agama), sementara *USA Today* (19/4): *Muslim Voters Oust Jakarta's Christian Governor* (Pemilih Muslim menjungkalkan Gubernur Kristen Jakarta).³⁷

Setidaknya ada tiga narasi yang dikembangkan terkait dengan kekalahan Ahok-Djarot dalam Pilkada DKI Jakarta. *Pertama*, kemenangan Anies-Sandi dianggap merepresentasikan kemenangan Islam politik dalam panggung politik Indonesia. Islam politik yang dimaksud di sini adalah praktik politik praktis dengan menggunakan sentimen, ideologi dan identitas Islam sebagai instrumen untuk meraih kemenangan. Sentimen ini semakin kokoh dan mendapatkan legitimasi moral karena Ahok beragama Kristen yang minoritas dan tengah diadili karena kasus tuduhan penistaan agama. *Kedua*, implikasi dari

³⁶ Muhammad Rizky, "Melacak Akar Gerakan Islamisme di Indonesia," *Majalah Al-Fikr*, (Mei-Oktober 2017), 26.

³⁷ Ben Otto and Anita Rachman, "Islamist-Backed Candidate Ousts Jakarta's Christian Governor Victory Marks a Breakthrough for Hard-Liners in Indonesian Politics," *The Wall Street Journal Jakarta*, (April 2017).

menguatnya wajah Islam politik di Jakarta adalah memberikan angin segar bagi kelompok Islamis untuk mengartikulasikan ideologi mereka di ruang publik.³⁸

Kelompok islamis yang selama ini bergerak di wilayah pinggiran negara beringsut masuk dalam struktur negara, bahkan dapat menjadikan negara sebagai instrumen untuk mewujudkan cita-cita mereka. *Ketiga*, hal yang kemudian banyak dikhawatirkan oleh para pengamat Indonesia akibat dominasi kaum Islamis dalam ruang publik adalah meningkatnya kecenderungan intoleransi dalam kehidupan berbangsa. Indikasi tersebut dianggap telah nampak dan dipraktikkan sepanjang musim.³⁹

Dalam kajian komunikasi politik, terdapat tiga tingkatan publik. Pertama ialah *laten public*, yaitu masyarakat yang menghadapi problem sama. Selanjutnya, pada tingkatan kedua saat masyarakat tersebut menyadari bahwa mereka memiliki masalah *atau aware public*. Jika masyarakat yang sadar ini mengorganisasikan diri sebagai sebuah kelompok dan melakukan sesuatu, mereka disebut *active public*. Jika ditinjau dari teori di atas, maka peristiwa 2 Desember 2016 (212) merupakan aksi yang dilakukan oleh *active public*. Mereka adalah orang-orang yang telah sadar terhadap problem yang sedang dihadapi. Tak hanya itu, didorong oleh semangat juang membela agama, publik 212 bersedia mengorganisir diri bersama-sama. Jubah organisasi, kelompok, latar belakang mereka ganti dengan kebanggaan sebagai sesama muslim. Jadilah ia aksi 'demonstrasi' terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Betapa tidak, 7 juta orang dari berbagai provinsi berjuang untuk hadir. Membuat Jakarta penuh sesak. Padahal, pihak aparat menggunakan berbagai cara untuk menghalang-halangi mereka. Dahsyatnya, orang sebanyak itu dapat terkontrol, berbaris rapi dalam shaf-shaf, tak merusak taman, tak mengotori dan justru menebar damai.⁴⁰

Suasana diliputi ketakdziman kepada ulama dan *ukhuwah muslimin*. Sekali lagi, kondisi tersebut hanya dapat lahir dari kesadaran (*aware*) dan keinginan bersatu (*organize*). Mereka datang bukan karena ikut-ikutan, atau tanpa tujuan, apalagi untuk hiburan. Kehadiran mereka benar-benar bertujuan menuntut haknya sebagai warga negara beragama.⁴¹ Akhirnya, aksi bersejarah yang tadinya dituduh macam-macam justru menuai pujian. Bahkan menjadi sorotan beberapa Negara asing. Tidak mengherankan jika aksi 212 tidak berhenti di hari itu saja. Aksi 212 menjadi sebuah gerakan massa yang tak terikat oleh ruang dan waktu. Tidak hanya terjadi di Monas dan sekitarnya, tetapi kesadaran

³⁸ Ummah, "Akar Radikalisme Islam di Indonesia", 115.

³⁹ Muh. Faruq al-Mundzir, "Saat Anda Gagal Merencanakan, Berarti Anda Telah Merencanakan Kegagalan," *Kiblat.Net*, (Jakarta 2017).

⁴⁰ Ummah, "Akar Radikalisme Islam di Indonesia", 115.

⁴¹ Al-Mundzir, "Saat Anda Gagal Merencanakan, Berarti Anda Telah Merencanakan Kegagalan," *Kiblat.Net*, (Jakarta 2017).

itu diaplikasikan menjadi sebuah gerakan menuju kebangkitan. Dilakukan dari hari ke hari, bulan ke bulan, hingga tak terasa mencapai setahun.

E. Pendidikan Multikultural dalam Menanggulangi Narasi Islamisme di Indonesia

Masyarakat Indonesia terdiri dari jenis kelamin, suku bangsa, bahasa, budaya, struktur sosial, nilai-nilai, tradisi dan sebagainya yang beraneka ragam. Perbedaan ini merupakan sebuah kekayaan dan juga sesuatu yang dapat dijadikan bahan-bahan untuk mencapai berbagai kebutuhan. Akan tetapi, tidak semua orang menyadari hal tersebut, sehingga cenderung bersikap individualistik, kurang peduli terhadap masyarakat, tidak melihat bahwasannya keberlangsungan dan ketertiban masyarakat sangat berpengaruh kepada ketentraman hidupnya. Masyarakat memiliki fungsi sebagai penerus budaya dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Proses ini berlangsung secara dinamis, sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan masyarakat. Adapun yang menjadi media sebagai alih budaya ialah pendidikan dan interaksi sosial.

Menurut para ahli sosiologi pendidikan, terdapat relasi resiprokal antara dunia pendidikan dengan kondisi sosial masyarakat. Relasi ini bermakna bahwa apa yang berlangsung dalam dunia pendidikan merupakan suatu gambaran dari kondisi yang tengah ada dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi hal tersebut tidak selalu berbanding lurus adakalanya mengalami kesenjangan. Beberapa faktor kesenjangan yaitu kesenjangan ekonomi, perseteraan politik, perebutan kekuasaan, persaingan antar agama. Sebagian besar konflik yang ada "agama" dinilai menjadi salah satu faktor yang ikut andil sebagai pemicu.⁴²

Dewasa ini marak adanya Narasi Islamisme yang tengah beredar ditengah masyarakat. Narasi Islamisme merupakan salah satu bentuk beberapa atau sekelompok masyarakat yang tidak dapat memaknai sebuah keragaman dengan benar. Narasi Islamisme ini bertujuan untuk melahirkan sebuah usaha dari sebagian atau beberapa kelompok yang menginginkan imajinasinya menjadi nyata. Adapun yang menjadi target penerus ialah para remaja atau pemuda yang kemudian diiming-imingi imbalan dan sebagainya. Untuk menanggulangi Narasi Islamisme tersebut dunia pendidikan memiliki andil yang sangat besar dalam hal ini. Untuk itu dunia pendidikan menawarkan sebuah pendidikan multikultural yang didalamnya terdapat beberapa konsep yaitu, demokrasi, persamaan, kebebasan dan pluralisme.

⁴² Ngainun Naim & Achmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural; Konsep dan Aplikasi* (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media Group, 2010), 14.

Konsep demokrasi yang dimaksud dalam pendidikan multikultural ini bukan yang bersifat sekularis, liberalistik, dan antroposentris seperti Barat, akan tetapi demokrasi yang diinginkan adalah demokrasi yang memadukan antara kepentingan individu dan sosial, antara nilai-nilai yang berasal dari Tuhan dan nilai-nilai yang berasal dari manusia dalam hal ini islam menyebutnya dengan *syura* bukan demokrasi liberal yang berbasis kekerasan seperti dunia Barat. Dalam hal ini yang dimaksudkan ialah agar dalam kelompok yang beragam serta tujuan yang beragam dapat dimusyawarahkan (*shurā*) untuk merumuskan suatu perkara. Dengan musyawarah diharapkan tidak akan terjadi pertentangan dalam satu kelompok dengan kelompok yang lain yang kemudian hari akan menyebabkan timbulnya Narasi-narasi yang saling memojokkan kelompok lain.

Konsep persamaan dalam pendidikan multikultural ini bukan persamaan seperti dunia Barat yaitu hanya mengakui persamaan hukum dimana mereka dianggap sama dan harus setara dimuka hukum. Persamaan yang diinginkan ialah bahwa semua orang harus diperlakukan sama dalam segala hal, karena mereka memang sama. Yang membedakan bukanlah hal-hal yang bersifat kontemporer dan fisik seperti pangkat, kedudukan, kekayaan, dan sebagainya akan tetapi hal-hal yang bersifat kualitatif, moralitas, spiritualitas dan amal perbuatannya seperti keimanan, ketaqwaan, ketinggian akhlaknya. Sehingga timbul konsep yang menuntut persamaan hukum dan hak-hak istimewa yang tidak dibenarkan. Dalam hal ini, persamaan kesempatan dalam pendidikan merupakan prioritas utama karena pendidikan dapat menciptakan mobilitas sosial yang mana semakin tinggi pendidikan hampir dipastikan dapat meningkatkan prestise, kemampuan dan kekayaan yang tinggi.

Konsep kebebasan, kebebasan bagi mereka kaum Barat adalah membiarkan segala yang diinginkan manusia sehingga dapat mencapai tujuan hidupnya, berupa kebahagiaan yang setinggi-tingginya Akan tetapi bukan kebebasan yang demikian yang ada dalam pendidikan multikultural yakni sebuah kebebasan yang bertanggung jawab, kebebasan yang dikendalikan oleh kebebasan orang lain, kebebasan yang dibatasi hukum, adat istiadat, moral dan kesepakatan bersama.

Konsep pluralisme atau keragaman yang yang mendatangkan keberkahan dan nilai tambah bagi manusia yang mana hal tersebut didasarkan pada perilaku yang saling menghargai, menghormati, memanfaatkannya secara produktif untuk kepentingan bersama, saling meminta dan memberi, saling menunjang dan menopang, saling berbagi pengalaman kehidupan masing-masing, rasa tidak saling mengganggu dan mencampuri urusan masing-masing, dan selalu mencari titik temu untuk kebaikan bersama.

F. Kesimpulan

Dari paparan di atas, mengindikasikan bahwa pendidikan multikultural menjadi sesuatu yang sangat penting dan mendesak untuk di implementasikan dalam praksis pendidikan di Indonesia. Karena pendidikan multikultural dapat berfungsi sebagai sarana alternatif pemecahan konflik. Manusia dalam al-Qu'an disebutkan dengan menggunakan berbagai kata salah satunya dengan kata *al-na>s*. Kata tersebut menjelaskan bahwasannya manusia secara sosiologis terdiri dari jenis kelamin, suku bangsa, bahasa, budaya, struktur sosial, nilai-nilai, tradisi, budaya dan lain sebagainya yang beraneka ragam. Seharusnya manusia memanfaatkan keanekaragaman ini sebagai bahan-bahan kebutuhan hidupnya, karena secara naluriah manusia adalah makhluk yang membutuhkan keberadaan orang lain.

Wacana ini dimaksudkan untuk menanggulangi narasi islamisme dengan mengimplementasikan pendidikan multikultural di berbagai jenjang pendidikan. Ini berarti proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku dan aliran (agama) harus diteguhkan. Dengan demikian, pendidikan multikultural menghendaki penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap harkat dan martabat manusia. Pendidikan multikulturalisme dengan keempat pilarnya menghendaki terciptanya sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang demokratis, kesamaan, kebebasan, dan berwawasan pluralisme. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang berbasis pada keseimbangan antara kebebasan manusia dan kehendak mutlak Tuhan, antara kepentingan individu dan sosial, antara mayoritas dan minoritas. Konsep multikultural tersebut yang harus menjadi visi-misi dan tujuan yang harus diperjuangkan oleh pendidikan. Dengan pendidikan multikultural diharapkan generasi selanjutnya yang telah mengenyam pendidikan mampu menciptakan lingkungan, bangsa yang tak lagi memunculkan narasi Islamisme.

G. Referensi

- Arifi (al), Akhmad Hidayatullah. "The Implementation of Multicultural Education in The Educational Practices," *Jurnal Pembangunan Pendidikan*. Vol. 1, No. 1 (Juni 2012).
- Arifudin, Iis. "Pemikiran Alternatif Pendidikan," *Jurnal Insania*. Vol. 12 No.2 (Mei-Agustus 2007).
- Baidhawiy, Zakiyuddin. *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*. Jakarta : Gelora Aksara Pratama, 2005.

- Barker, Chris. *Cultural Studies*, Terj. Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2000.
- Fikri, Zainal. "Narasi Dediradikalisasi di Media *Online* Republika dan Ar Rahmah", *Jurnal Lektur Keagamaan*. Vol. 11 No. 2 (2013).
- Idris, Faisal Nurdin. "Memetakan Narasi Islamisme di Medan, Sumatera Utara ; Investigasi terhadap Pola Penyebaran dan Penerimaan Terhadap Radikalisme," *Jurnal Politik dan Komunikasi (JIPi)*. Vol. 5 No. 2 (Desember 2015).
- Irianto, Yoyon Bahtiar. *Kebijakan Pembaruan Pendidikan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011.
- Jabiri (al), M. Abid. *Syuro; Tradisi Partikularitas & Universalitas*. Yogyakarta: LKIS, 2013.
- Maarif, Ahmad Syafii. "Setelah "Bela Islam", Gerakan Sosial Islam, Demokratisasi, dan Keadilan Sosial," *Jurnal Maarif*. Vol. 11 No. 2 (Desember 2016).
- Mahmudi., Zulaeha, Ida., dan Supriyanto, Teguh. "Menulis Narasi dengan Metode Karyawisata dan Pengamatan Objek Langsung Serta Gaya Belajarnya," *Jurnal Journal of Primary Education*. Vol. 2 (Januari 2013).
- Masykuri, Abdillah. *Demokrasi di Persimpangan Makna; Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999.
- Mudzakkir, Amin. "Islam dan Politik di Era Kontemporer," *Jurnal Epistemé*. Vol. 11, No. 1, (Juni 2016).
- Mundzir (al), Muh. Faruq. "Saat Anda Gagal Merencanakan, Berarti Anda Telah Merencanakan Kegagalan," *Kiblat.Net*. (Jakarta 2017).
- Naim, Ngainun., & Sauqi, Achmad. *Pendidikan Multikultural; Konsep dan Aplikasi*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media Group, 2010.
- Nata, Abuddin. *Sosiologi Pendidikan Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014.
- Otto, Ben., and Rachman, Anita. "Islamist-Backed Candidate Ousts Jakarta's Christian Governor Victory Marks a Breakthrough for Hard-Liners in Indonesian Politics," *The Wall Street Journal Jakarta*. (April 2017).
- Parekh, Bikhu. *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. Cambridge: Harvard University Press, 2000.
- Pidarta, M. *Landasan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Puspita, Hari. "Tradisi Petan dan Medsos," *Majalah Al-Fikr*. (Mei-Oktober 2017).

- Rizky, Muhammad. "Melacak Akar Gerakan Islamisme di Indonesia," *Majalah Al-Fikr*. (Mei-Oktober 2017).
- Syaikhu, Ach. "Pemikiran tentang Pengembangan Pendidikan Islam Multikultural," *Jurnal Falasifa*. Vol. 7 No. 1 (Maret 2016).
- Tilaar, H.A.R. *Multikulturalisme dan Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.
- Ujan, Andre Ata. *Multikulturalisme*. Jakarta : Indeks, 2011.
- Ummah, Sun Choirol. "Akar Radikalisme Islam di Indonesia," *Jurnal Humanika*. No.12 (September 2012).
- Zaini, Moh. Zuhri "Memahami dan Menangkal Kelompok Radikal Transnasional," *Majalah Al-Fikr*. (Mei-Oktober 2017).